



**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PANTAI TAMPORA
KABUPATEN SITUBONDO**

The Development and Management Tampora Beach Situbondo District

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

AJENG OKTASA WARDANY

NIM (130903102021)

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III USAHA PERJALANAN WISATA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PANTAI TAMPORA
KABUPATEN SITUBONDO**

The Development And Management of Tampora Beach Situbondo District

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Ajeng Oktasa Wardany
NIM 130903102021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III USAHA PERJALANAN WISATA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan kepada:

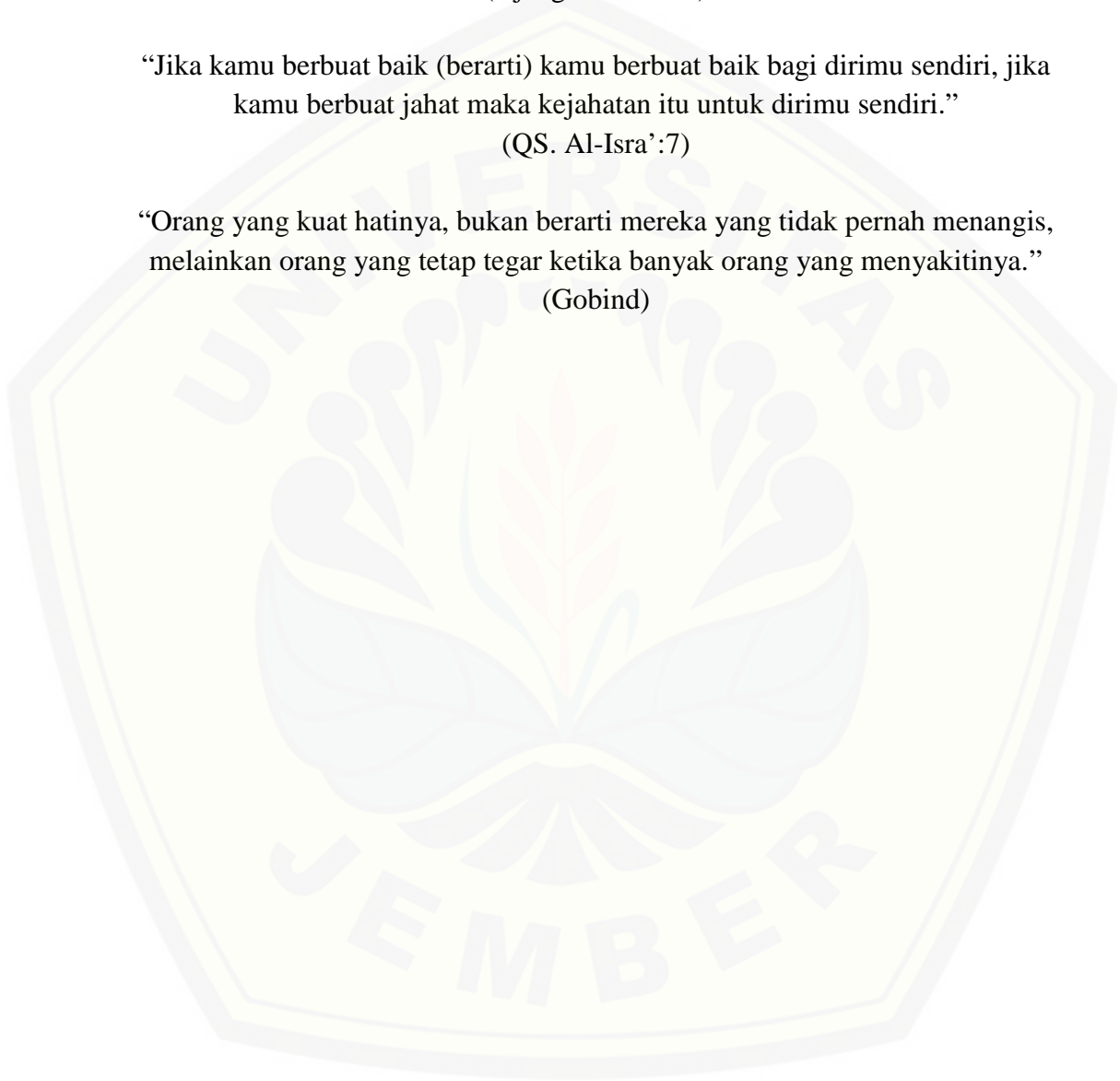
1. Ibunda tercinta Sholik Masrifatin, yang selalu memberi dukungan serta doa penuh kepada saya;
2. Keluarga besar H. Abdillah Bin Ismail, Uncle, Aunty, saudara sepupu yang telah menyemangati selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
3. Guru-guru mulai dari TK Khodijah, SDN 02 Benculuk, MTsN Cluring, dan SMAN 1 Purwoharjo, dan segenap dosen DIII Usaha Perjalanan Wisata;
4. Dosen pembimbing Rebecha Prananta, S.Si., M.Si yang telah sabar membimbing dan sangat teliti dalam proses mengerjakan tugas akhir ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen DIII Usaha Perjalanan Wisata yang telah bersedia memberikan ilmunya;
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“The true purpose of education is to make minds, not careers.”
(Ajeng Oktasa W.)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.”
(QS. Al-Isra’:7)

“Orang yang kuat hatinya, bukan berarti mereka yang tidak pernah menangis, melainkan orang yang tetap tegar ketika banyak orang yang menyakitinya.”
(Gobind)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Ajeng Oktasa Wardany

NIM : 130903102021

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Tampora Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2016

Yang Menyatakan,

Ajeng Oktasa Wardany

NIM.130903102021

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PANTAI TAMPORA
KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh:

Ajeng Oktasa Wardany

NIM.130903102021

Pembimbing:

Rebecha Prananta, S.Si., M.Si

NIP. 198612032015042002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PRODRAM STUDI DIPLOMA III USAHA PERJALANAN WISATA

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Ajeng Oktasa Wardany
NIM : 130903102021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Usaha Perjalanan Wisata
Judul : “Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Tampora
Kabupaten Situbondo”.

Jember, 23 Juni 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Rebecha Prananta, S.Si., M.Si
NIP 198612032015042002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul:

“Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Tampora Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si

NIP 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota

Rebecha Prananta, S.Si., M.Si

NIP 198612032015042002

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP 197909192008122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Tampora Kabupaten Situbondo; Ajeng Oktasa Wardany, 130903102021 ; 2016: 42 halaman; Program Studi D III Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dinas Pariwisata memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan industri kepariwisataan dalam suatu destinasi. Di Indonesia sendiri, peran Pemerintah (Nasional) khususnya Dinas Pariwisata disamping masih berfungsi utama besar sebagai regulator utamanya dalam menentukan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan. Peranan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah utamanya berfungsi sebagai Fasilitator dalam program promosi dan pemasaran pariwisata nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 47 Tahun 2007 maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mendapatkan wewenang dalam memajukan sektor pariwisata Kabupaten Situbondo baik dalam segi promosi dan penyedia sarana prasarana.

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang sangat strategis karena dikelilingi oleh pegunungan dan perkebunan, serta hutan lindung. Kabupaten yang terbagi menjadi 17 kecamatan ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Kabupaten Probolinggo di sebelah barat, dan Kabupaten Bondowoso di sebelah selatan. Dengan luas wilayah 1.638,50 Km dan terletak di tengah jalur darat Jawa-Bali seharusnya menjadi kota yang strategis untuk disinggahi para wisatawan, serta banyaknya wisata alam yang tidak kalah indah dengan kabupaten lain. Salah satu keindahan alam yang tidak kalah cantik dengan Pasir Putih yaitu Pantai Tampora.

Pantai Tampora merupakan pantai yang terletak di Kalianget, Desa Banyuglugur, Kec. Besuki Situbondo yang termasuk dalam wilayah Perhutani, terletak di pinggir jalur Anyer – Panarukan serta memiliki panorama yang sangat indah, namun kurangnya fasilitas dan sarana prasarana dalam menuju pantai ini

Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo melakukan sinergi terhadap Perhutani untuk memanfaatkan kawasan Pantai Tampora sebagai tujuan utama para wisatawan dalam berkunjung ke Situbondo. Untuk menarik perhatian masyarakat pihak pengelola dan fasilitator harus bersedia untuk menyediakan apasaja yang dibutuhkan wisatawan seperti halnya pusat informasi, akomodasi, sarana prasarana, dll. Dalam hal ini Dispar Kab. Situbondo berupaya untuk mengembangkan dan menjadikan Pantai Tampora sebagai tujuan destinasi utama para wisatawan dengan mengajak para investor serta LSM bekerja sama dan melakukan MOU agar mampu mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan suatu destinasi, Disparbudpora juga melakukan promosi melalui *website* dan berupaya terus untuk memperbaiki serta memberikan masukan terhadap perhutani dalam program pengembangan agar tidak merusak lingkungan sekitar Pantai Tampora demi menjaga kearifan lokal demi pariwisata yang berkelanjutan.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Tampora Kabupaten Situbondo”. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Dra. Sri Wahjuni, M.Si., selaku Ketua Program Studi D III Usaha Perjalanan Wisata.
4. Rebecha Prananta, S.Si, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
5. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
7. Kepada Drs. Tulus Prijatmadji serta seluruh staf kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang telah membantu menyelesaikan laporan ini;
8. Seluruh staf akademik dan kemahasiswaan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya;
9. Terimakasih kepada Dulur-dulur Wisma Gita dan Teman-teman seperjuangan DIII Usaha Perjalanan Wisata angkatan 2013;
10. Teman-teman UKMF WISMA GITA FISIP, terimakasih atas kekeluargaannya;
11. Serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih doa dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua.

Jember, 23 Juni 2016

Penulis



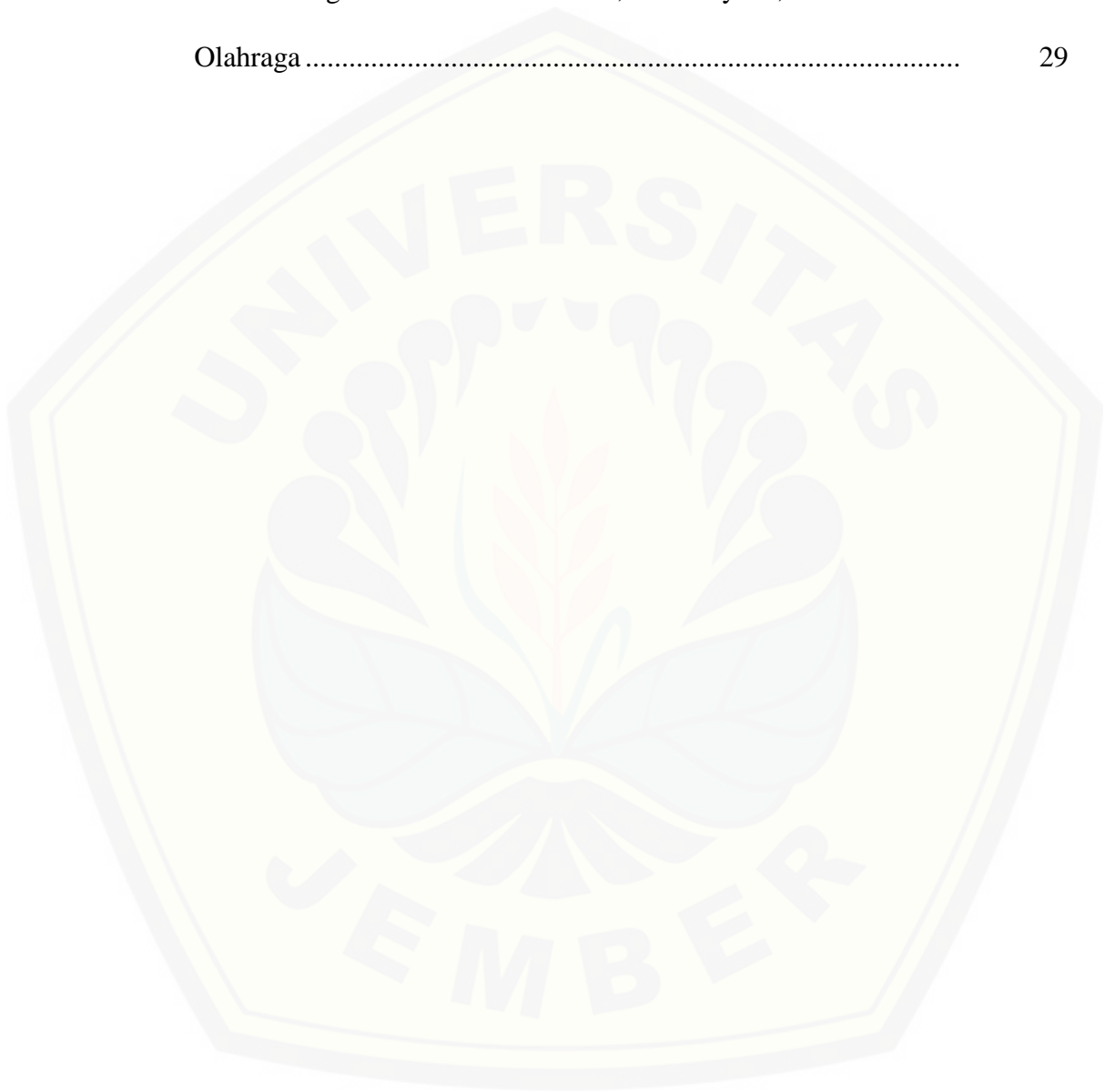
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Pariwisata	5
2.2 Perencanaan Pariwisata	5
2.3 Unsur-Unsur Pokok Perencanaan	8
2.4 Pengembangan Pariwisata	9
2.5 Pembangunan Destinasi Pariwisata	13
2.6 Pengelolaan Destinasi Pariwisata	14
2.7 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata	16
BAB 3. GAMBARAN UMUM	17
3.1 Profil Perusahaan	17

3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	18
3.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Disparbudpora	
Kab. Situbondo	18
3.2.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disparbudpora	
Kab. Situbondo	19
3.3 Fungsi, Tugas dan Struktur SKPD	20
3.3.1 Fungsi dan Tugas	20
3.3.2 Struktur Organisasi Disparbudpora	
Kab. Situbondo	29
3.4 Susunan Kepegawaian	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata	32
4.2 Tempat Praktek Kerja Nyata	32
4.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	33
4.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	33
4.5 Daya Tarik Pantai Tampora	35
4.6 Proses Pengembangan Pantai Tampora	36
4.7 Peran Disparbudpora Dalam Pengembangan Pantai	
Tampora	37
4.8 Pengelolaan Destinasi Pantai Tampora	38
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

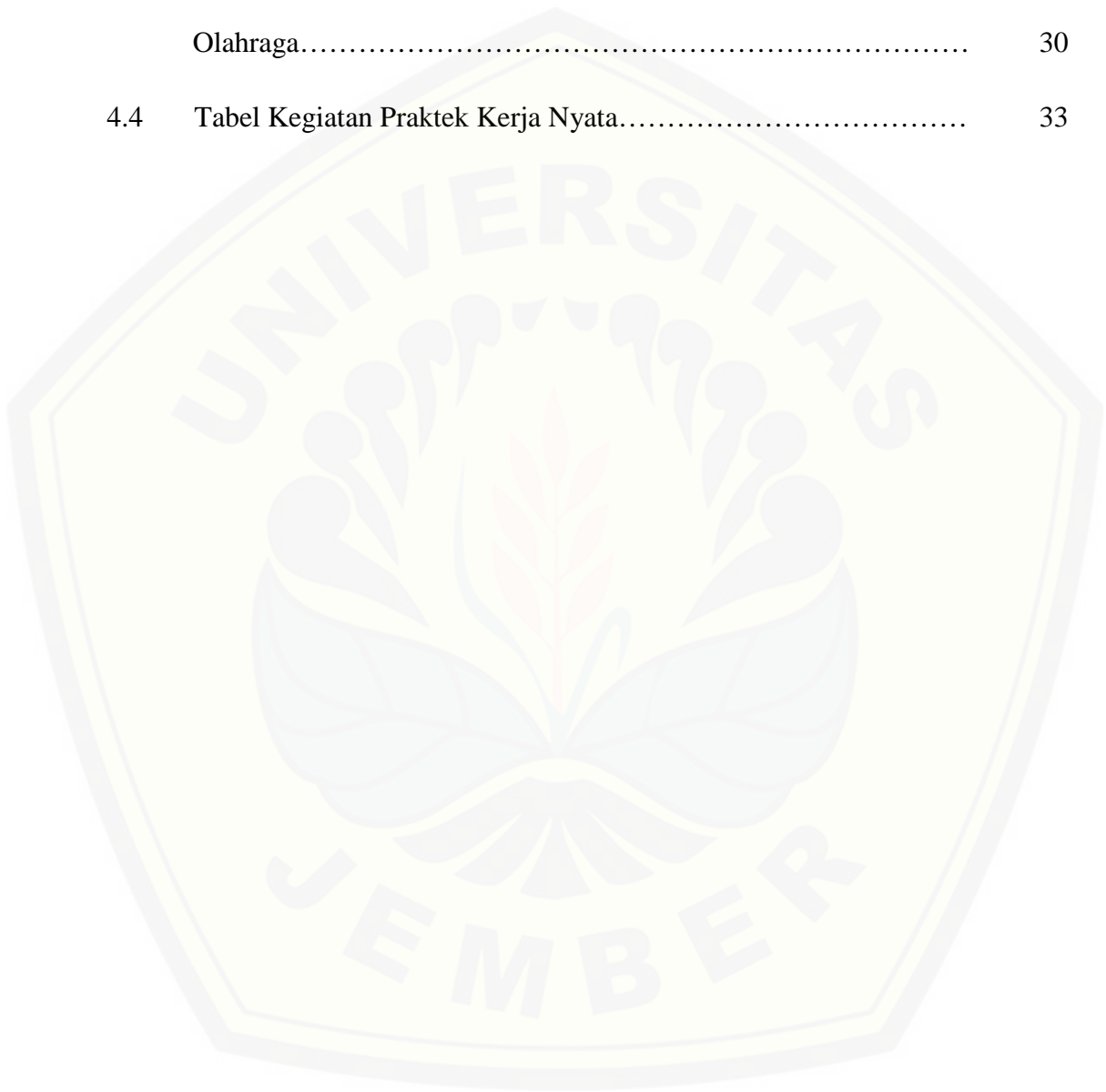
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	29



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.4 Susunan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.....	30
4.4 Tabel Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	33



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang menjadi andalan nomor satu bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang beragam mulai dari keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (*etnik*). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek cerah, tetapi hingga saat ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Sektor pariwisata tidak saja mampu meningkatkan penghasilan devisa namun juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dari segi industri, sektor pariwisata banyak melibatkan industri lainnya. Industri yang terlibat dalam sektor pariwisata antara lain: Hotel dan Restoran, *Tour dan Travel*, Transportasi, Pusat wisata dan Souvenir. Pengembangan pariwisata juga memberikan keuntungan bagi daerah, serta masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tujuan wisata tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong semangat bagi Pemerintah Daerah

untuk memajukan pariwisata, dengan jalan memperbaiki fasilitas yang ada dan membangun fasilitas lain di daerah wisata. Perhatian Pemerintah terhadap sektor pariwisata salah satunya ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, dimana dijelaskan bahwa modal berupa sumber daya buatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata Indonesia.

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang sangat strategis karena dikelilingi oleh pegunungan dan perkebunan, serta hutan lindung. Kabupaten yang terbagi menjadi 17 kecamatan ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Kabupaten Probolinggo di sebelah barat, dan Kabupaten Bondowoso di sebelah selatan. Dengan luas wilayah 1.638,50 Km dan terletak di tengah jalur darat Jawa-Bali seharusnya menjadi kota yang strategis untuk disinggahi para wisatawan, serta banyaknya wisata alam yang tidak kalah indah dengan kabupaten lain. Dengan keadaan potensi pariwisata yang cukup kompetitif tersebut, pemerintah Kabupaten Situbondo berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tugas dan Tujuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo yaitu: (a) Mewujudkan daya saing objek wisata unggulan, (b) Meningkatkan pelestarian Budaya lokal, (c) Mewujudkan kepeloporan pemuda produktif, (d) Mewujudkan olahraga yang berbasis partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Situbondo telah memberikan wewenang kepada Disparbudpora dalam memajukan sektor pariwisata Kabupaten Situbondo.

Banyak objek wisata yang menarik di Situbondo antara lain yang sudah tidak asing lagi bagi para wisatawan yaitu pantai Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran, yang saat ini masih tetap menjadi primadona bagi wisatawan yang berkunjung ke Situbondo. Pasir putih merupakan pantai yang berombak kecil dan

memiliki pemandangan alam bawah laut yang cantik, dan Taman Nasional Baluran merupakan satu-satunya padang savana terluas di Pulau Jawa. Namun ada juga pantai yang tidak kalah cantik dengan pasir putih, salah satunya adalah Pantai Tampora.

Pantai Tampora merupakan pantai yang terletak di Kalianget, Desa Banyuglugur, Kec. Besuki Situbondo, dengan titik koordinat $7^{\circ} 43'31''\text{S}$ $113^{\circ} 38'57''\text{E}$. Pantai ini termasuk dalam wilayah Perhutani yang terletak di pinggir jalur Anyer – Panarukan memiliki panorama yang sangat indah, saat menjelang pagi maupun sore hari kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa, yaitu adanya *sunrise* atau *sunset* yang sangat indah dengan langit yang berwarna merah dan laut yang membiaskan warna merah dari sinar matahari sore. Hewan laut di pantai ini masih beragam seperti teripang, bintang ular laut, landak laut, kepiting, ikan-ikan kecil, dan berbagai jenis kerang yang melimpah, serta tebing tinggi yang menambah segarnya tiupan angin ketika kita berada di pantai tersebut. Namun minimnya informasi terkait letak dan aksesibilitas menuju Pantai Tampora ini membuat para wisatawan enggan dan bahkan tidak pernah mengerti tentang adanya pantai cantik ini. Dengan mengetahui kondisi Pantai Tampora yang dari segi pengembangannya masih kurang optimal maka Dinas Pariwisata dan Perum Perhutani menawarkan kerja sama dengan PT. Ipmomi Paiton Energy, serta LSM (Format For Green) untuk pengembangan Pantai Tampora. Pengembangan Wana Wisata Pantai Tampora ini lebih cenderung ke Wisata Edukasi, karena rencana Perhutani sendiri ingin membuat Arboretum (Kebun Botani yang ditanami khusus dengan berbagai jenis macam pohon) demi mengurangi dampak negatif akibat kegiatan wisatawan dan menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Kurang optimalnya pengelolaan, tidak jelasnya tujuan, serta tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak terkait (Dinas Pariwisata Kab. Situbondo, Perum Perhutani, PT. Ipmomi, dan Format For Green) serta masyarakat sekitar juga tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Karena dalam pengembangan serta pengelolaanpun butuh kerjasama dengan beberapa pihak, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan

pengembangan objek wisata Pantai Tampora. Untuk menarik minat para wisatawan perlu strategi perencanaan serta sistem pengelolaan yang baik untuk mengurangi faktor-faktor kerusakan alam sekitar serta menjaga budaya yang ada di sekitar objek wisata.

Dari uraian di atas maka penulis bermaksud menulis Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul: “PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PANTAI TAMPORA KABUPATEN SITUBONDO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui tentang :

- 1) Bagaimana pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Pantai Tampora?
- 2) Bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora?

1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Paktek Nyata:

1.3.1 Tujuan Kerja Paktek Nyata:

- 1) Mengetahui bagaimana pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Pantai Tampora;
- 2) Mengetahui peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan dan pengelolaan pengelola Pantai Tampora.

1.3.2 Manfaat Kerja Paktek Nyata:

- 1) Manfaat bagi pengelola:

Sebagai acuan atau masukan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo tentang rencana pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora.

- 2) Manfaat bagi penulis:
 - a. Untuk mengembangkan dan menjabarkan teori akademik ke dalam dunia kerja terutama dalam bidang kepariwisataan;
 - b. Untuk mengetahui tentang bagaiman rencana pengembangan serta pengelolaan di Pantai Tampora;
 - c. Sebagai acuan dalam mengukur kemampuan berinteraksi dengan pihak pengelola dan warga sekitar Pantai Tampora.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti berulang-ulang atau berkali-kali sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab IPasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

2.2 Perencanaan Pariwisata

Menurut Sunyitno (dalam Mastika, 2005:6) menyebutkan bahwa “perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha membuat rencana, membuat ikhtisar yang lengkap dan terperinci mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk dikerjakan dan dengan cara bagaimana melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan”. Perencanaan merupakan proses penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dikerjakan, berdasarkan berbagai pertimbangan yang paling menguntungkan atas kondisi-kondisi yang ada baik internal maupun eksternal, serta diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pentingnya perencanaan dalam sebuah wisata dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman penyelenggara wisata, sebagai sarana untuk memprediksikan kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif untuk memecahkannya, sebagai sarana untuk mengarahkan penyelenggaraan wisata sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien, dan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan wisata sebagai upaya pengawasan atau evaluasi dalam rangka memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan wisata selanjutnya.

Menurut Handinoto (1996:57) perencanaan pembangunan pariwisata memerlukan berbagai proses dan tahapan yaitu diantaranya adalah :

- 1) Persiapan studi, adalah awalan bagi badan perencana di bawah pemerintahan daerah memutuskan atau melakukan studi dan menyusun acuan kerja atau organisasi.
- 2) Penentuan sasaran, merumuskan maksud pokok memrakarsai study, misalnya untuk menunjang pengembangan pariwisata kota dalam rangka meraih manfaat ekonomi (yang terukur) dan lingkungan kota serta manfaat bagi penduduk kota melalui menciptakan lapangan kerja dan memperluas pelayanan bagi penduduk maupun wisatawan.
- 3) Semua elemen, menghimpun ragam sumberdaya pariwisata dan perkembangan daerah maupun ekonomi kepariwisataan. Untuk itu perlu dikumpulkan data perihal kebutuhan pariwisata kota (misalnya: karakteristik wisatawan, pola perjalanan, dan kecenderungannya) dan ketersediaan sumber daya kepariwisataan (misalnya: daya tarik, akomodasi, fasilitas, prasarana, struktur ekonomi pariwisata, dan lingkungan) serta penilaian kemungkinan tentang penanaman modal bagi perkembangan dimasa depan.
- 4) Analisis dan sintesis temuan temuan, mengacu pada proses analisis informasi yang diperoleh dari hasil penyigian sebagai dasar perumusan rencana.
- 5) Rumusan kebijakan dan rencana, menyusun draft rencana pengembangan berdasarkan pilihan kebijakan pariwisata.
- 6) Dasar pertimbangan usulan, adalah tahap perencanaan seluruhnya diajukan kepada komisi perencanaan pemerintah daerah untuk dikaji dan memperoleh

masukan. Diskusi berlangsung antara penyusun rencana dan komisi perencanaan pemerintah dapat juga dilakukan konsultasi kepada pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian.

- 7) Pelaksanaan dan pemantauan rencana, tahap rencana diwujudkan dalam tindakan, kegagalan baru disadari saat proses berjalan maka dari itu perlu diadakan pemantauan.
- 8) Tinjauan berkala, mengacu pada proses pelaporan balik atas kemajuan rencana dan tahap study persiapan sering perlu dilakukan lagi.

Kegagalan rencana di tahap ini sering diakibatkan oleh :

- a. Kegagalan membangkitkan minat pengembang.
- b. Ketidak mampuan membuat aturan yang diperlukan untuk proses pengembangan lahan.
- c. Kegagalan koordinasi *public sector* dan swasta.
- d. Kelangkaan anggaran *public sector* untuk melaksanakan rencana keseluruhan.
- e. Ketersediaan sarana prasarana angkutan yang tidak memadai.
- f. Ketidak mampuan memahami posisi masyarakat atas pengembangan pariwisata yang dapat menunda rencana.

Menurut Hirarkiperencanaan pembangunan kepariwisataan meliputi berbagai tingkatan yaitu diantaranya adalah :

- 1) Tingkat nasional (*nationalplanning*), mencakup wilayah nasional dengan mengacu pada rencana strategis RENSTRA yang meliputi:
 - a. UU no. 10 Th 2009 Tentang Kepariwisataaan.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM)
 - c. Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPNAS).
- 2) Tingkat Daerah Tujuan Wisata (DTW), sub DTW, dan Kawasan,mencakup wilayah kabupaten dan propinsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) yang meliputi:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPDA) Tk 1
 - b. Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPDA)
 - c. Rencana induk pengembangan kawasan.

- 3) Obyek wisata, mencakup wilayah dimana obyek wisata tersebut berada dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) dan desain teknis yang meliputi rencana tapak dan desain teknis.

2.3 Unsur-Unsur Pokok Perencanaan Pariwisata

Menurut Handinoto (1996:69) Unsur pokok yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan pariwisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya meliputi:

- a. Atraksi

Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin berkunjung (Spillane, 1987:63). Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora&fauna, cirri khas perairan air laut/danau), objek buatan manusia (museum katedral, masjid kuno, makam kuno, dsb).

- b. Fasilitas Pelayanan

Walaupun atraksi menarik wisatawan dari rumah atau tempat tinggalnya, namun fasilitas dibutuhkan untuk melayani mereka dalam perjalanan. Fasilitas yang dimaksud memberikan pelayanan dan penyediaan sarana yang dibutuhkan para wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik.

- c. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam penelitian ini menyangkut transportasi dan juga komunikasi-informasi. Dalam kegiatan pariwisata hanya mungkin berkembang dengan dukungan teknologi modern khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi ini sangat penting membantu para wisatawan, mengantar dari tempat asal ataupun tempat penginapan ke objek wisata. Namun penggunaan transportasi ini tergantung pada jarak dan kebutuhan komunikasi antara tempat di mulainya suatu kunjungan ke objek wisata yang akan di kunjungi, (Pendit, 1996:21).

d. Infrastruktur

Adalah situasi yang mendukung fungsi fasilitas pelayanan, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah maupun di bawah tanah. Penyediaan infrastruktur tersebut meliputi: penyediaan saluran air bersih, pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan terminal, penyediaan penerangan listrik, sistem komunikasi dan juga saluran pembuangan limbah.

e. Akomodasi

Penyediaan akomodasi atau tempat menginap merupakan salah satu sarana yang paling penting bagi para wisatawan. Akomodasi merupakan rumah kedua bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dengan tujuan untuk menginap. Fasilitas akomodasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberadaan suatu objek wisata.

2.4 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke, 1998:99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :

- a. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
- b. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
- c. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
- d. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

- e. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Fisik

Menurut UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dalam lingkungan fisik berdasarkan olahan dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Geografi

Aspek geografi meliputi luas kawasan DTW, Luas area terpakai, dan juga batas administrasi serta batas alam.

- b. Topografi

Merupakan bentuk permukaan suatu daerah khususnya konfigurasi dan kemiringan lahan seperti dataran berbukit dan area pegunungan yang menyangkut ketinggian rata-rata dari permukaan laut, dan konfigurasi umum lahan.

- c. Geologi

Aspek dari karakteristik geologi yang penting dipertimbangkan termasuk jenis material tanah, kestabilan, daya serap, serta erosi dan kesuburan tanah.

- d. Klimatologi

Termasuk temperatur udara, kelembaban, curah hujan, kekuatan tiupan angin, penyinaran matahari rata-rata dan variasi musim.

- e. Hidrologi

Termasuk di dalamnya karakteristik dari daerah aliran sungai, pantai dan laut seperti arus, sedimentasi, abrasi.

f. *Visibility*

adalah pemandangan terutama dari ujung jalan yang kanan-kirinya berpohon (barisan pepohonan yang panjang).

g. Vegetasi dan *Wildlife*

Daerah habitat perlu dipertimbangkan untuk menjaga kelangsungan hidup vegetasi dan kehidupan liar untuk masa sekarang dan akan datang. Secara umum dapat dikategorikan sebagai tanaman tinggi, tanaman rendah (termasuk padang rumput) beserta spesies-spesies flora dan fauna yang terdapat di dalamnya baik langka, berbahaya, dominan, produksi, konservasi maupun komersial.

2) Aspek Daya Tarik

Pariwisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong wisatawan untuk datang mengunjunginya. Gunn (1979;50) menyebutkan:

“... a thing or feature which draws people by appealing to their desires, taste, etc. Especially an interesting or amusing exhibition which ‘draws’ crowds”. Gunn (1979;50) juga berpendapat bahwa *“attraction are the on-location places in region that not only provide the things for tourist to see and do but also offer the lure to travel”*.

Daya tarik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. *Natural attraction*: berdasarkan pada bentukan lingkungan alami;
- b. *Cultural attraction*: berdasarkan pada aktivitas manusia, diantaranya iklim, pemandangan, flora dan fauna serta keunikan alam lainnya;
- c. *Special types of attraction*: atraksi ini tidak berhubungan dengan kedua kategori diatas, tetapi merupakan atraksi buatan seperti: *theme park, circus, shopping*. *Cultural attraction* mencakup sejarah, arkeologi, religidan kehidupan tradisional.

3) Aspek Aksesibilitas

Salah satu komponen infrastruktur yang penting dalam destinasi adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dalam kegiatan pariwisata hanya mungkin berkembang dengan dukungan teknologi modern khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi ini sangat penting membantu para wisatawan, mengantar dari tempat asal ataupun tempat penginapan ke objek wisata. Namun penggunaan transportasi ini tergantung pada jarak dan kebutuhan komunikasi antara tempat di mulainya suatu kunjungan ke objek wisata yang akan di kunjungi (Pendit, 1996:21). Akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aspek fisik yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat.

4) Aspek Aktivitas dan Fasilitas

Dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan yang bermacam-macam. Fasilitas bukanlah merupakan faktor utamayang dapat menstimulasi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata, tetapi ketiadaan fasilitas dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Pada intinya, fungsi fasilitas haruslah bersifat melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukan dalam rangka mendapat pengalaman rekreasi. Di samping itu, fasilitas dapat pula menjadi daya tarik wisata apabila penyajiannya disertai dengan keramahtamahan yang menyenangkan wisatawan, dimana keramahtamahan dapat mengangkat pemberian jasa menjadi suatu atraksi wisata.

5) Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Dalam analisa sosial ekonomi membahas mengenai mata pencaharian penduduk, komposisi penduduk, angkatan kerja, latar belakang pendidikan masyarakat sekitar, dan penyebaran penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini perlu dipertimbangkan karena dapat menjadi suatu tolak ukur mengenai apakah posisi

pariwisata menjadi sektor unggulan dalam suatu wilayah tertentu ataukah suatu sektor yang kurang menguntungkan dan kurang selaras dengan kondisi perekonomian yang ada. Selanjutnya adalah mengenai aspek sosial budaya, dimana aspek kebudayaan dapat diangkat sebagai suatu topik pada suatu kawasan. “Para pelaku perjalanan tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pada informasi pemrosesan dan pengevaluasian. Mereka juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, masyarakat, dan gaya hidupnya. Kebudayaan itu cenderung seperti pakaian tradisional dan kepercayaan pada suatu masyarakat, religi, atau kelompok etnik (*ethnic group*)”.

2.5 Pembangunan Destinasi Pariwisata

Menurut Sunaryo (2013:159) dalam pembangunan pariwisata menurut beberapa pakar seperti: Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd and Wanhill (1998), yang intinya mengandung tujuan yang sama bahwa kerangka pengembangan Destinasi Pariwisata paling tidak harus mencakup beberapa komponen utama yaitu:

- a. Objek dan Daya Tarik (*Attractions*) yang mencakup: daya tarik yang bias berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/*artificial*, seperti *event* atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*special interest*).
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi: *route* atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan transportasi lainnya.
- c. Amenitas (*Amenities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, *souvenir*, dan fasilitas kenyamanan lainnya.
- d. Fasilitas Pendukung (*Ancillary Service*), yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dsb.

- e. Kelembagaan (*Institutions*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*).

Dalam pengembangan destinasi wisata perlu juga adanya pengembangan sistem teknologi informasi yang mempunyai peran penting serta nilai positif dalam pengembangan aktifitas kepariwisataan, diperlukan sebuah sistem yang secara holistik mampu diterapkan pada level lokal, regional maupun nasional. Sifat sistem tersebut hendaknya lebih diposisikan kedalam bentuk sistem teknologi bidang kepariwisataan desentralisasi, dengan pengertian bahwa unsur lokal di daerah menjadi aktor penting dalam menjalin komunikasi secara langsung dengan pengguna atau calon wisatawan. Pendesain teknologi informasi kepariwisataan yang mempunyai nilai jual tinggi (dari sisi pengguna), tentunya memerlukan beberapa tekstur yang mampu membangkitkan unsur kemenarikan dari informasi itu sendiri. Dalam pendesain sebuah teknologi informasi yang representatif bagi pengguna, diperlukan identifikasi terhadap berbagai faktor sentral dan krusial yang dibutuhkan oleh pengguna. Berikut merupakan faktor krusial dan sentral dalam penerapan teknologi informasi bidang kepariwisataan (Sunaryo, 2013:159):

- a. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pada destinasi wisata;
- b. Penekanan pada aspek kemenarikan dari destinasi wisata;
- c. Peluang-peluang jalinan komunikasi timbal balik antara pengguna dengan penyedia jasa layanan;
- d. Informasi penting, tempat-tempat menarik, kondisi terbaru, iklim dari destinasi wisata.

2.6 Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Sebenarnya mengenai pengelolaan (*management*) sistem pariwisata memerlukan pembahasan yang komprehensif dan detail, yang layak untuk menjadi sebuah buku tersendiri. Dalam pembahasan ini manajemen hanya akan dibahas dalam beberapa aspeknya saja. Pengelolaan (*management*) menurut Leiper

(1990:257), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan);
2. *Directing* (mengarahkan);
3. *Oranizing* (termasuk coordinating);
4. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan Drucker mengartikan manajemen sebagai berikut :

“.....the specific tool, the specific function, the specific instrument, to make institutions capable of producing result..... The critical functions in tourism management are planning, coordination and control” (Richardson & Fluker, 2004: 178)

Leiper(1990:257) menekankan bahwa koordinasi merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus dipisahkan dan memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi merujuk kepada fungsi seorang manajer untuk menterjemahkan sebuah informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan pengarahan (*directing*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen yang baik dan efektif memerlukan penguasaan atas orang-orang yang akan dikelola. Di tingkat individual, orang akan mudah mengatur hidupnya begitu ia bisa mandiri. Di tingkat sosial, subyek manajemen menurut (Leiper, 1990:257) adalah organisasi dan kumpulan organisasi yang merupakan:

“.....grouping of people working in a prescribed or structured fashion towards predetermined ends....management involves the conscious integration of organizational activity to achieve chosen ends”

Seorang manajer dapat mengelola input, proses, dan output dari sistem organisasinya namun tidak dapat mengelola dan mengontrol faktor-faktor yang berada di luar organisasi meski faktor-faktor tersebut ikut menentukan bagaimana organisasi tersebut berjalan. Jadi cakupan dan limit dari manajemen tergantung pada sistem organisasi di mana kekuasaan manajerial diaplikasikan.

2.7 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Dowling dan Fennel(2003:2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
- 2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal;
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo

Berdasarkan dari suatu perencanaan yang efisien, efektif, rasional, proporsional, dan profesional, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan suatu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Situbondo dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) renstra merupakan acuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk menyusun rencana kerja tahunan. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada rencana pembangunan jangka panjang, pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Desain masa depan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 harus memberikan kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang diformalkan dalam visi rencana pembangunan jangka menengah daerah 2015-2021.

Arah masa depan daerah sebagai visi pembangunan daerah yang setidaknya terdiri dari: visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen:

- 1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
- 2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
- 3) Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)

Yang Masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni:

Visi RPJPD : Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.

Visi RPJMD : memberikan arah yang nyata untuk lima tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.

Visi renstra SKPD : merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mengatasi target yang tertuang dalam RPJMD, terkait tujuan pokok fungsi SKPD.

Dengan penjelasan diatas dapat di sampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 tahun dan tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggung jawab terhadap misi pembangunan Kabupaten Situbondo menindak lanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan SKPD.

3.2 Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Situbondo maka Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagai berikut:

3.2.1 Visi Misi dan Tujuan Disparbudpora Kab. Situbondo

Visi : Mewujudkan daya saing Wisata melalui seni budaya dan produktivitas pemuda serta prestasi olahraga. Misi : (a) Mewujudkan objek-objek wisata unggulan yang mampu berdayasaing; (b) Meningkatkan dan melestarikan budaya daerah; (c) Membangun kepeloporan pemuda produktif; (d) Mengembangkan olahraga berbasis partisipasi masyarakat.

Tujuan pembangunan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yang dapat memberikan arah dalam melaksanakan program yaitu :

- a. Terwujudnya daya saing objek wisata unggulan
- b. Terwujudnya pelestarian Budaya Lokal
- c. Terwujudnya Kepeloporan Pemuda Produktif
- d. Terwujudnya Olahraga yang berbasis partisipasi masyarakat.

3.2.2 Saran, Strategi, dan Kebijakan Situbondo Disparbudpora Kab. Situbondo

Sasaran :

Sasaran yang dituju oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga:

- 1) Meningkatnya Daya saing Obyek Wisata Unggulan.
- 2) Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal.
- 3) Meningkatnya Kepoloporan Pemuda Produktif.
- 4) Meningkatnya Olahraga yang berbasis Partisipasi Masyarakat.

Strategi :

Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016–2021, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menerapkan Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pengembangan pembangunan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- 2) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program dengan instansi/dinas terkait di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kebijakan :

Adapun Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 diarahkan untuk meningkatkan terwujudnya masyarakat Kabupaten Situbondo yang beriman, sejahtera dan berkeadilan melalui :

- a. Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat bersama Dunia Usaha dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan pengembangan pembangunan obyek pariwisata yang mampu berdaya saing beserta pemberdayaan potensi budaya Tradisional, Regional dan Nasional.

- c. Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan insan pemuda olahragawan yang dinamis, berprestasi dan sejahtera.
- d. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang Efektif, Berprestasi, Inovatif dan Berstandart Nasional.

3.3 Fungsi, Tugas, dan Struktur Organisasi SKPD

3.3.1 Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas dan perbekalan lain;
- c. Pelaksanaan urusan surat – menyurat;
- d. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. Penyusunan Laporan Kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;

- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar;
- b. Penyiapan dan pendistribusian surat Dinas dan undangan rapat;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Penyiapan rencana kebutuhan barang Dinas;
- e. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- f. Pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan . Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
- b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- d. penyusunan LAKIP Dinas;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di bidang pariwisata dan kebudayaan. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pemantauan dan penilaian kegiatan pembinaan kebudayaan;

- d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. Penyiapan dan penyebarluasan pedoman petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan kebudayaan;
- h. Pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga/kelompok yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan;
- j. Perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan;
- k. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- l. Pembinaan obyek dan sumber daya kepariwisataan dan mencegah dampak negatif industri pariwisata;
- m. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata;
- n. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan terdapat beberapa seksi diantaranya yaitu:

1. Seksi Sarana Penunjang Wisata

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang sarana penunjang wisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Penunjang Wisata;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penyidikan usaha pariwisata daerah;
- c. Penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana penunjang wisata;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan penilaian kualitas dan kuantitas sarana penunjang wisata;
- e. Penginventarisasi sarana penunjang wisata;

- f. Pembuatan analisis kebutuhan sarana penunjang wisata;
- g. Pemantauan dan pengevaluasi sarana penunjang wisata;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang obyek dan daya tarik wisata. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata;
- c. Penyusunan konsep rencana pembinaan dan bimbingan pengembangan kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar lembaga usaha pariwisata dalam pengembangan usaha pariwisata daerah;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pengembangan pariwisata dengan Dinas terkait dan Provinsi;
- f. Pembinaan kegiatan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata daerah;
- g. Penganalisa pemasaran dan pengaturan pengelolaan daya tarik wisata;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang kebudayaan dan keurbakalaan. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan;
- b. Penyusunan dan penyebarluasan pedoman serta petunjuk penyelenggaraan kegiatan nilai sejarah tradisional dan kegiatan museum purbakala;
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai-nilai sejarah bangsa;
- d. Penanaman nilai-nilai sejarah, nasional dan kesenian masyarakat serta melaksanakan pengembangan pemeliharaan/perlindungannya;
- e. Pemasyarakatan sejarah dan melestarikan budaya tradisional;
- f. Pelaksanaan penghematan, pengamanan sejarah dan budaya tradisional;
- g. Perencanaan, pembinaan, dan pengembangan museum dan purbakala;
- h. Pengembangan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum dan purbakala;
- i. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelestarian keurbakalaan dan kesenian daerah;
- j. Pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian museum dan peninggalan purbakala;
- k. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kebudayaan di masyarakat serta mengembangkan nilai sejarah tradisional;
- l. Penyaluran dan pemantauan subsidi/bantuan alat-alat kebudayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan kebudayaan serta pelestarian dan pemeliharaan museum dan peninggalan purbakala;
- m. Pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan kebudayaan serta pelestarian dan pemeliharaan museum dan peninggalan purbakala;
- n. Pengkoordinasian dengan instansi lintas sektoral untuk penanganan dan pelestarian peninggalan purbakala dan museum;
- o. Pelaksanaan ketatausahaan;

- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- q. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di bidang kepemudaan dan olah raga. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. Penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga;
- c. Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- d. Pemantauan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- e. Pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan olah raga;
- f. Pengusahaan bantuan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga juga terdapat beberapa seksi diantaranya yaitu:

1. Seksi Kepemudaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang kepemudaan. Seksi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Produktif;

- b. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif pada lembaga terkait;
- c. Penyiapan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif;
- d. Pemantauan dan penilaian kegiatan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif;
- e. Pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang organisasi kepemudaan dan pemuda produktif;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Olah Raga

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang pengembangan olah raga. Seksi Pengembangan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Olah Raga;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga pada lembaga terkait;
- c. Penyiapan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan olah raga;
- d. Pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan olah raga;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data tentang pengembangan olah raga;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang olah raga;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan

- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

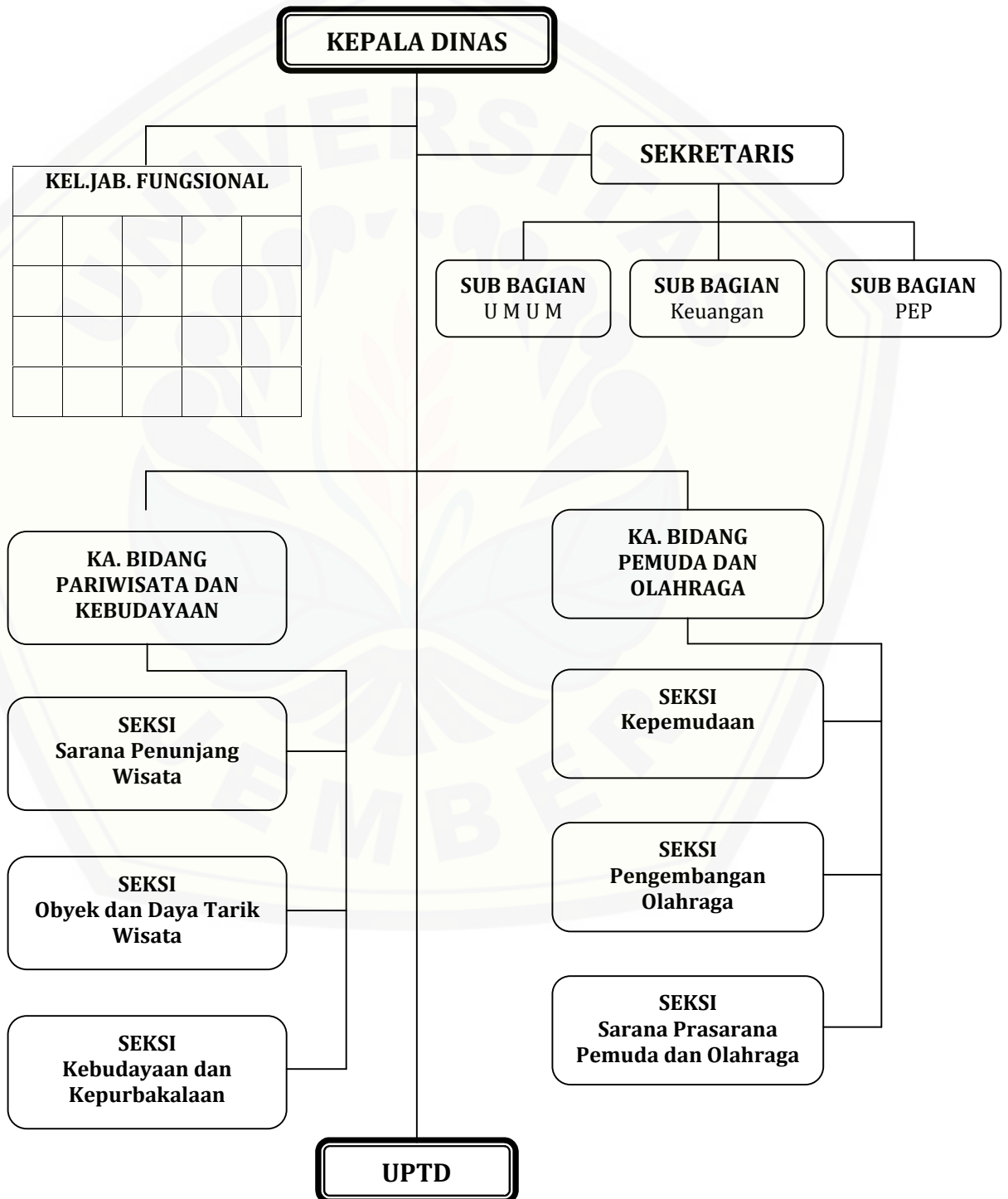
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olah raga. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga;
- c. Penyebaran petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- e. Pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pemuda dan olahrag;
- f. Penginventaris sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- g. Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga;
- h. Penganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- i. Penyiapan pedoman petunjuk penyimpangan, distribusi, penggunaan, penghapusan dan inventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olah rag;
- j. Penyiapan bahan usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung untuk pemuda dan olah raga;
- k. Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- l. Pelaksanaan ketatausahaan;
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SITUBONDO**



Sumber: Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Situbondo 2016-2021

3.4 Susunan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

NO.	N A M A	JABATAN	PANGKAT/GOL
1.	Drs. Tulus Prijatmadji	Kepala Dinas	Pembina Tingkat I (IV/b)
2.	Zainal Arifin, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Pembina (IV/a)
3.	Jupri Setyo Utomo, S.Stp	Ka.Bid. Parbud	Penata Tingkat I (III/d)
4.	H. Syaiful Bari, S.Sos, M.M	Ka.Bid. Pora	Pembina (IV/a)
5.	Dhian Pramusinta E.,S.Ap	Ka.Sub.Bag. PEP	Penata (III/c)
6.	Dra. Lusi Indriyanti	Ka. Sub.Bag. Keuangan	Pembina (IV/a)
7.	Agus Hariwahyono	Ka.Sub.Bag. Umum	Penata (III/c)
8.	Drs. Ec. Djony Soesanto	Kasi Kepurbakalaan dan Kebudayaan	Penata Tk. I (III/d)
9.	Dra. Susi Indahwati, S.Sos	Kasi Sarana Penunjang Wisata	Penata Tk. I (III/d)
10.	Drs. Partono Pranayoga	Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata	Penata Tk. I (III/d)
11.	Drs. Agus Budiono	Kasi Kepemudaan	Penata Tk. I (III/d)
12.	Drs. Didik Budiantoro	Kasi Pengembangan Olahraga	Penata Tk. I (III/d)
13.	Hj. Wiwik Sutarti, S.Sos, M.Si	Kasi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Pembina (IV/a)
14.	Siti Fatimah,S.Sos,M.Pd	Staf Bag. Umum	Penata (III/c)
15.	Achmad Budiono	Staf Bag. Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)
16.	Agus Mewanto	Staf Bag. Umum	Pengatur Tk. I (II/d)
17.	Edy Sugiarto	Staf Bag. Keuangan	Pengatur (II/c)
18.	Agus Nadi,S.Pd	Staf Bag. Keuangan	Pengatur Tk. I (II/d)
19.	Rr. Shinta Heny P.	Staf Bag. Keuangan	Pengatur Muda Tk. I (II/b)

20.	Irawan Hari Prayitno, S.S	Staf Bag. P.E.P	Penata Muda Tk. I (III/b)
21.	Sugeng Hermanto,Amd.	Staf Seksi Sarana Pendukung Wisata	Penata Muda (III/a)
22.	Suhartini	Staf Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata	Penata Muda Tk. I (III/b)
23.	Suhermadji	Staf Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata	Pengatur (II/c)
24.	Ika Wahyuningsih	Staf Kepurbakalaan dan Kebudayaan	Pengatur (II/c)
25.	Indra Birawa Soeseno	Staf Kepurbakalaan dan Kebudayaan	Pengatur (II/c)
26.	I. Made Ray Putra A.	Staf Seksi Kepemudaan	Pengatur Muda (II/a)
27.	Lutfi Hidayat	Staf Seksi Kepemudaan	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
28.	Sudibyو,S.Sos	Staf Seksi Pengembangan Olahraga	Penata (III/c)
29.	Yeni Winarni	Staf Seksi Pengembangan Olahraga	Pengatur (II/c)
30.	Redi Yuniansuro,S.Pd	Staf Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Penata (III/c)
31.	Anita Tanjung,A,Md	Staf Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Penata Muda (III/a)

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan selama *On The Job Training* di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Situbondo penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora, yaitu:

- 1) Dalam mengembangkan suatu destinasi Pengelola dan Dinas Pariwisata perlu kerjasama dengan semua pihak untuk mencapai suatu tujuan dalam mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan di Pantai Tampora;
- 2) Kurangnya komunikasi dan pengawasan dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora;
- 3) Kurangnya intensitas Dinas Pariwisata dalam mempromosikan Pantai Tampora;
- 4) Banyaknya ide yang dituangkan oleh pengelola dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora namun masih sedikit tindakan yang dilakukan.

5.2 Saran

Dari Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Situbondo ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pengelolaan Pantai Tampora, yakni:

- 1) Segi promosi dan pemasaran, diharapkan Dinas Pariwisata sebagai perwakilan Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan peran dalam segi Promosi dan Pemasarannya.
- 2) Perlu mengadakan suatu *event* di destinasi yang ada di Situbondo terlebih di Pantai Tampora sehingga masyarakat lokal dan luar kota mengetahui keberadaan pantai tersebut, hal ini bias digunakan sebagai ajang promosi;

- 3) Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana dalam menuju tiap destinasi, termasuk Pantai Tampora;
- 4) Pusat informasi dan petunjuk arah untuk mempermudah wisatawan luar kota/asing menuju destinasi Pantai Tampora;
- 5) Pemberdayaan masyarakat Pantai Tampora yang perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan kesan nyaman dalam menyambut wisatawan serta efek yang baik dalam segi ekonomi bagi para pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah;
- 6) Peran LSM (Format For Green) diharapkan mampu meminimalisir efek negatif dari kegiatan pariwisata, agar lingkungan sekitar Pantai Tampora tetap terjaga dan bisa berjalan seperti yang dimusyawarahkan.
- 7) Rencana dan ide yang telah disepakati untuk segera di wujudkan demi berjalannya program pengembangan Wana Wisata Pantai Tampora.

DAFTAR PUSTAKA

- DinasPariwisata, Kebudayaan, Pemuda, danOlahraga.2016.*RencanaStrategi 2016-2021*. Disparbudpora: Situbondo.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. 2015. *Daya Tarik Wisata Kabupaten Situbondo*. Surabaya: Disbudpar Provinsi Jatim.
- Gunn, Clare A. 1979. *Tourism Planning*. New York: Crane Russak & Company. Inc.
- Handinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Leiper, Neil. 1990. *Tourism System: An. Interdisciplinary Prespective*. Departement of Management System, Business Studies Faculty, Massey University, Palmerston North, New Zeland.
- Mastika, I.K. 2005. *Manajemen Pariwisata*. Jember: Universitas Jember.
- Pendit, S Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2007: Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata.
- Richardson, John and Martin Fluker. 2004. *Understanding and Managing Tourism*. Australia: Pearson Education.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: GavaMenia.
- Sunyitno. 1999. *Perencanaan Wisata Tour Planning*. Yogyakarta: Krisius.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Swarbrooke, J. 1996. *Sustainable Tourism Management*. London: CABI Publishing.

UU RI Nomor 9 Tahun 1990: Tentang Kepariwisata.

UU RI Nomor 10 Tahun 2009: Tentang Kepariwisata.

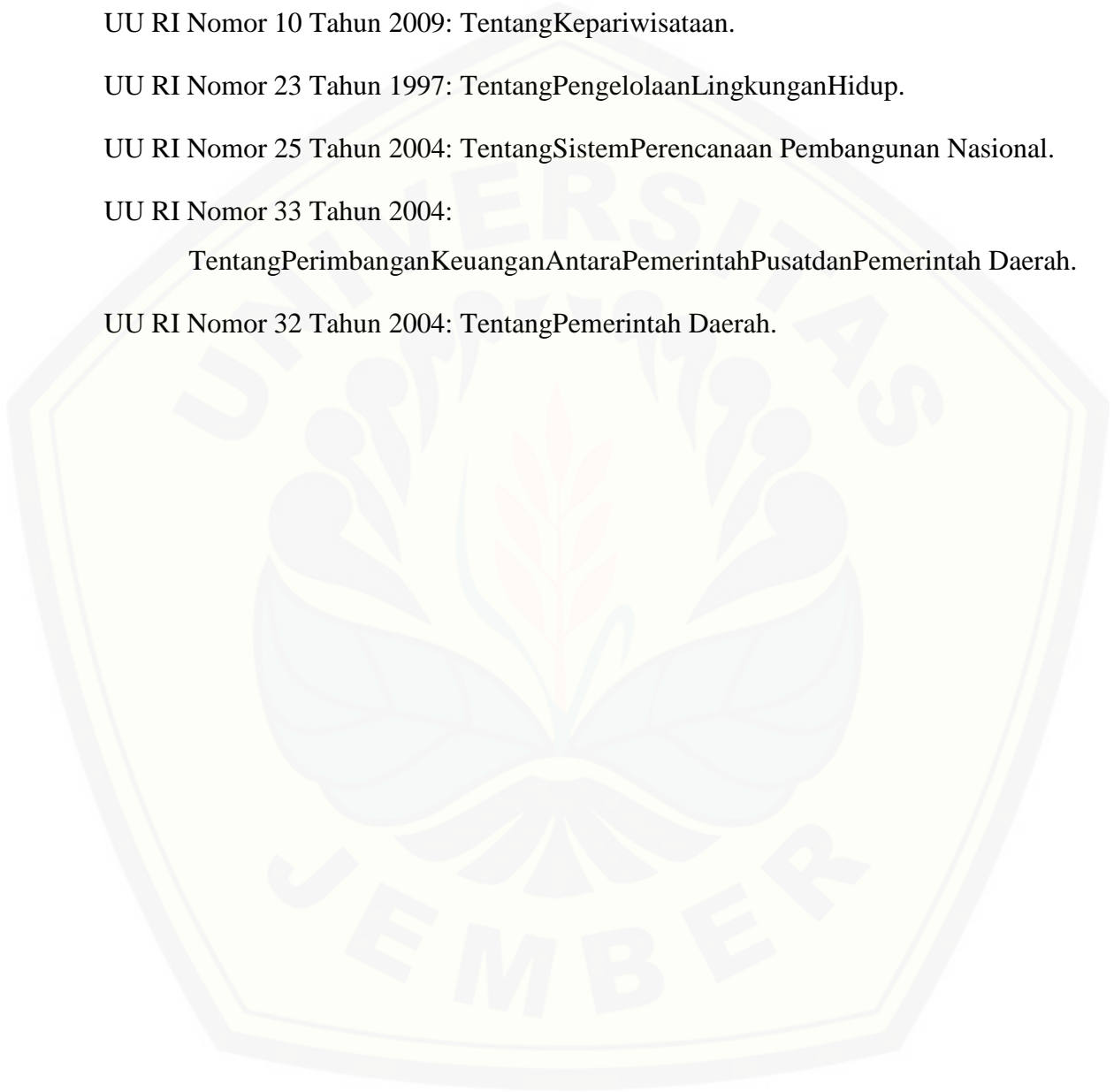
UU RI Nomor 23 Tahun 1997: Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU RI Nomor 25 Tahun 2004: Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU RI Nomor 33 Tahun 2004:

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004: Tentang Pemerintah Daerah.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121

Nomor : 858/UN25.1.2/SP/2016
Lampiran : satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

16 Maret 2016

Yth. Pimpinan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Jl. PB Sudirman No. 200
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

Nama : Ajeng Oktasa Wardany
NIM : 130903102021
Program Studi : DIII Usaha Perjalanan Wisata

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. PB. Sudirman No.37 Telp. (0338) 676072 Fax (0338) 676070
SITUBONDO 68312

Situbondo, 28 Maret 2016

Nomor : 556 / 119 / 431.215.2.1/2016 Kepada.
Sifat : Penting Yth. Rektor Universitas Jember
Lampiran : - Di -
Perihal : Ijin Magang (PKL) J E M B E R

Mencukupi surat Saudara nomor : 858/UN.25.1.2/SP/2016 tanggal : 16
Maret 2016 perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan, bersama ini kami
sampaikan bahwa kami memberikan ijin magang (Praktek Kerja Lapangan)
mulai tanggal 22 Maret s/d 17 Juni 2016 (selama 3 bulan), kepada :

Nama : Ajeng Oktasa Wardany
NIM : 130903102021
Prodi : D3 Usaha Pariwisata

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. TULUS PRIJATMADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620407 198603 1 014

Tembusan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342. Fax (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1018/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo nomor : 556/119/431.215.2.1/2016 perihal Ijin Magang (PKL), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Ajeng Oktasa Wardany
NIM : 130903102021
Program Studi : DIII Usaha Perjalanan Wisata

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Industri/Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 17 Juni 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 April 2016

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Situbondo
2. Kaprodi D3 Usaha Perjalanan Wisata
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboyo Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	79	B
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Ajeng Oktara Warsany
 NIM : 130903102021
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Usaha Perjalanan Wisata

Yang menilai :

Nama : DUPRI SETYO UTOMO, S-STEP
 Jabatan : KA. BIDANG PERWILAYATAN & KEBUDAYAAN
 Instansi : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 Tanda Tangan : 

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



LAMPIRAN

PANTAI TAMPORA SITUBONDO







DENAH LOKASI PANTAI TAMPORA



**PENINJAUAN LOKASI PANTAI TAMPORA DALAM
PENGEMBANGAN WANA WISATA**







**WAWANCARA TERHADAP PERUM PERHUTANI KKPH
PROBOLINGGO DI DESA KALIANGET KEC. BANYUGLUGUR**



KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SDM DESA WISATA DI
WONOREJO

